

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian terdahulu

Studi mengenai tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) terhadap Kesejahteraan Sosial telah dilakukan oleh berbagai peneliti. Secara ringkas disajikan ringkasan penelitian-penelitian sejenis yang menjadi referensi dan inspirasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Diah Rizki Hardiana (2017)

Penelitian tersebut judul “Implementasi Sustainable Development Goals dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan” berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Implementasi dari Sustainable Development Goals (SDGs) di Jakarta belum terealisasi dalam semua aspek. Meskipun sebagian pembangunan di Jakarta telah mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Terdapat aspek yang belum terealisasikan yaitu dalam aspek ekonomi dan sosial. Dalam aspek sosial yang mana berdasarkan Perpres terkait SDGs yaitu mengakiri bentuk kemiskinan di mana pun. Kemiskinan belum bisa diakhiri di Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret tahun 2017 sebesar 389,69 ribu orang yaitu jika diprosentasikan mencapai 3,77% dari jumlah penduduk DKI Jakarta. Dan dibandingkan dengan data bulan September tahun 2016 terdapat 385,84 ribu orang dan jika diprosentasikan terbilang 3,75%. Jumlah penduduk miskin

di Jakarta bertambah 3,85 ribu orang. Dengan kata lain pemerintah Jakarta belum bisa mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Jakarta. Dapat dikatakan juga bahwa agenda pemerintah DKI Jakarta kurang memprioritaskan tentang masalah kemiskinan. Padahal pada dasarnya kemiskinan adalah permasalahan yang penting karena dengan meningkatnya angka kemiskinan pasti akan berdampak pada aspek yang lain, seperti lingkungan. Dalam aspek lingkungan dengan meningkatnya angka kemiskinan akan mengakibatkan semakin banyak kejahatan di masyarakat karena biasanya jika orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, orang tersebut akan semakin 'nekat' dalam mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu dampak dari kemiskinan juga akan mempengaruhi generasi yang akan datang. Pada umumnya masyarakat yang tergolong miskin akan mengesampingkan pendidikan. Kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan akan mengakibatkan generasi tersebut kurang memahami atau toleransi, atau juga kurangnya wawasan akan mengakibatkan dapat dengan mudah diperalat atau dimanfaatkan oleh orang lain. Hal ini jika dikesampingkan tentu akan berakibat pada Bangsa Indonesia.

2. Wahyuningsih (2017)

Penelitian tersebut menggunakan judul "*Millenium Development Goals (MDGS)* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam Kesejahteraan Sosial" berdasarkan hasil analisis hasil yang diperoleh menunjukkan bahwasannya beberapa tujuan MDGs dan SDGs selaras dengan bidang usaha dan pelayanan kesejahteraan sosial sehingga keselarasan yang ada antara ketiganya dapat membantu memecahkan persoalan yang ada di masyarakat terutama untuk keberlangsungan manusia, planet demi kelangsungan perdamaian dan kemakmuran umat manusia.

SDGs merupakan bentuk penyempurnaan dari MDGs. SDGs merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDGs (*Millenium Development Goals*). SDG's memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim.

3. Ishartono & Santoso Tri Raharjo (2016)

Penelitian tersebut menggunakan judul “*Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan” penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya. Besar kecilnya masalah kemiskinan tidak dapat hanya dilihat dari persoalan angka statistik. Sekecil apapun angka statistik, di dalamnya terdapat persoalan manusia yang terancam hidupnya. Ada manusia yang hak-hak dasarnya dilanggar. Jika kemiskinan itu terjadi dalam keluarga, disitu ada anak-anak yang mungkin akan menghadapi masalah sampai tahap kelaparan, kekurangan gizi, hingga kesehatannya bahkan jiwanya terancam. Disitu pula anak-anak tidak mampu menikmati pendidikan, yang sebetulnya merupakan haknya dan ada pelanggaran hak-hak asasi manusia jika orang-orang di sekitarnya, masyarakatnya, apalagi jika negara membiarkan itu semua terjadi.

Dari perspektif hak asasi manusia, adanya kemiskinan adalah tanggung jawab lingkungan, baik dari dalam hal penyebab maupun solusinya. Oleh karena itulah berbagai kajian maupun upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya masih aktual, tetapi juga masih sangat dibutuhkan. Ia mengatakan bahwa Pekerjaan Sosial mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan masalah kemiskinan. Sudah berabad-abad profesi ini bergelut dan terlibat dalam penanganan kemiskinan. Secara historis

profesi pekerjaan sosial boleh dikatakan lahir dari masalah kemiskinan. Profesi ini bahkan menempatkan masalah kemiskinan sebagai bidang utama yang ditangani pekerjaan sosial. Jika sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, pekerjaan sosial harus berada di garis depan dalam upaya mengatasi kemiskinan. MDGs yang kemudian bergeser ke SDGs merupakan tujuan bersama yang memerlukan pengalawan bersama baik vertikal maupun horizontal.

4. Muhammad Fardan Ngoyo (2015)

Penelitian tersebut menggunakan judul “Mengawal *Sustainable Development Goals* (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan Berkeadilan” dalam penelitiannya mengatakan bahwa laporan ketimpangan yang dirilis oleh INFID tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh rata-rata 5% dalam 5 tahun terakhir berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global sebesar 3%. Namun, di saat bersamaan laju ketimpangan kian pesat. Berdasarkan laporan tersebut, setidaknya ada tujuh trend ketimpangan yang sangat memprihatinkan dan wajib menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK untuk menanganinya pada lima tahun ke depan. Ketujuh trend tersebut adalah (i) ketimpangan kesempatan kerja; (ii) ketimpangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan; (iii) pelayanan kesehatan; (iv) pelayanan air bersih; (v) tingkat harapan hidup; (vi) indeks pembangunan manusia; (vii) kesenjangan pendapatan antara level pekerja dan CEO.

Rakyat tidak boleh lagi dianggap hanya sebagai penduduk secara administratif namun sebagai warga negara yang memiliki seperangkat hak-hak dasar sebagai bagian dari republik ini. Maka dari itu seyogyanya, bila rakyat diposisikan sebagai subjek yang memiliki seperangkat hak yang harus dipenuhi dan diberikan kuasa untuk memikirkan,

menyusun, merencanakan, dan memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai target dan tujuan dalam proses pembangunan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bukanlah sesuatu yang *taken for granted* yang serta merta harus diikuti tanpa pernah memikirkan bagaimana dampak dan kontribusinya bagi rakyat banyak. Pada intinya proses pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada tiga komponen yakni sosial, lingkungan, dan ekonomi yang saling terhubung. Tercapainya tujuan dan target SDGs yang akan berlaku mulai tahun 2015 dan akan ditargetkan akan tercapai pada 2030 merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan upaya yang serius dari pemerintah. Selain itu, upaya serius dari pemerintah belumlah cukup bila tidak ada dukungan dari berbagai pihak yang menyokong terlaksananya tujuan tersebut. Partisipasi berbagai pihak dibutuhkan dalam upaya memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah perlu merangkul pihak lain seperti organisasi masyarakat sipil (NGO), masyarakat, pelaku usaha, hingga kaum muda dalam berpartisipasi dan memberikan kontribusi sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Karena, tujuan utama digagasnya pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana pembangunan yang mendatangkan kesejahteraan dapat dipertahankan untuk masa depan atau generasi mendatang.

Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) didefinisikan sebagai —*development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Istilah ini pertama kali dipopulerkan dalam *Our Common Future*, sebuah laporan dalam yang dipublikasikan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan *the world Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987. Sejak

kemunculannya, pembangunan berkelanjutan mempunyai banyak defenisi dan konsep itupun menjadi cair. Meskipun demikian, beberapa hal prinsipil mendapatkan penekanan. Pertama, komitmen pada keadilan dan *fairness*, dimana prioritas seyogyanya diberikan kepada masyarakat dunia yang paling miskin dan keputusan seharusnya mempertimbangkan hak-hak generasi yang akan datang. Kedua, sebagai suatu pandangan jauh ke depan (*long-term*) yang menekankan prinsip-prinsip *precautionary*, yaitu, —dimana ada ancaman serius atau sesuatu yang tidak bisa dicegah, kekurangan kepastian pengetahuan secara penuh seyogyanya tidak digunakan sebagai alasan untuk menunda ukuran-ukuran biaya efektif (*cost-effective measures*) guna mencegah degradasi lingkungan. Ketiga, pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan, dan memahami, sekaligus bertindak dalam kesaling hubungan yang kompleks yang ada di antara lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Lingkungan, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial ini menjadi tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan. Atas dasar tersebutlah kemudian melandasi sebuah upaya untuk membangun sebuah konsep pembangunan berkelanjutan yang diinisiasi oleh PBB. Pada tahun 2000, secara resmi digagas *Millenium Development Goals* (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015, dengan berbagai tujuan dan target yakni : 1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem 2) Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4) Menurunkan angka kematian anak 5) Meningkatkan kesehatan ibu 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya 7) Memastikan kelestarian lingkungan 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan Kedelapan tujuan tersebut bila

melihat pencapaian pembangunan yang telah mencapai batas waktu yakni tahun 2015, mungkin masih banyak hal yang belum tercapai sepenuhnya. Setelah era MDGs yang telah berakhir pada 2015, disusunlah sebuah dokumen pembangunan baru untuk melanjutkan capaian-capaian yang belum sempat terealisasi sembari menyempurnakan target-target yang lebih relevan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan bagi rakyat yaitu program SDGs atau pembangunan pasca-2015 yang mempunyai tujuan dan target SDGs ini yang akan berlaku hingga 2030, dimensi pokoknya terletak pada persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bersinggungan satu sama lain.

2.2 Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berbeda dengan penelitian – penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang terletak pada kurun waktu, ruang lingkup, tempat penelitian dan jumlah variabel yang digunakan untuk penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu seperti yang telah disebutkan diatas, yang juga merupakan dasar acuan untuk penelitian kali ini dengan judul “Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jombang”, dengan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (Y), sedangkan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemiskinan (X1), Tingkat Pendidikan (X2), dan Tingkat Kesehatan (X3).

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Kesejahteraan Sosial banyak dikemukakan oleh para ahli dan lembaga yang memperhatikan banyaknya masalah sosial yang timbul dalam masyarakat. Sebagaimana yang tertuang pengertian kesejahteraan sosial menurut para ahli sebagai berikut :

2.3.1.1 Walter A. Fridlander

Mendefinisikan Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuannya secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. Defenisi diatas menjelaskan bahwa: Pertama Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem atau "*organized system*" yang berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan sosial. Kedua, Tujuan sistem tersebut adalah untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam arti tingkat kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan relasi-relasi sosial dengan lingkungannya. Ketiga tujuan tersebut dapat

dicapai dengan cara, meningkatkan kemampuan individu baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya. Kesejahteraan sosial sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pertolongan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehatan, standar kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial baik pribadi maupun kelompok dimana kebutuhan keluarga dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

2.3.1.2 Arthur Dunham

Mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial . Hal tersebut selaras dengan definisi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), bahwasannya Kesejahteraan adalah suatu kondisi atau keadaan sejahtera baik fisik,mental maupun sosial, dan tidak hanya perbaikan-perbaikan penyakit sosial tertentu saja. Kemudian pengertian ini disempurnakan menjadi suatu kegiatan terorganisir dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka.

2.3.1.3 Secara Konsepsional

Pengertian Kesejahteraan Sosial termuat dalam Undang-undang No.11 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut : “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya ”Mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut dilaksanakan berbagai upaya, program dan kegiatan tersebut “Usaha Kesejahteraan Sosial” baik yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang No.11 Tahun 2009 bagian II pasal 25 juga menjelaskan secara tegas tugas serta tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang meliputi :

- a. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- b. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- c. Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial
- e. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

2.3.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini :

- 1) Tanpa Kemiskinan. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
- 2) Tanpa Kelaparan. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
- 4) Pendidikan Berkualitas. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
- 5) Kesetaraan Gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
- 6) Air Bersih dan Sanitasi. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
- 7) Energi Bersih dan Terjangkau. Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
- 8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak. Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10) Mengurangi Kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas. Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab. Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

13) Aksi Terhadap Iklim. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14) Kehidupan Bawah Laut. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

15) Kehidupan di Darat. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemaknaan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16) Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses

untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

2.3.3 Hubungan Kesejahteraan Sosial dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Terdapat beberapa tujuan dan target dalam SDGs sejalan dengan pengertian kesejahteraan sosial, tujuan dan pelayanan kesejahteraan sosial terutama pada : (Adi, 2014):

Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.

Tujuan 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan.

Tujuan 3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.

Tujuan 4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Tujuan 6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.

Tujuan 7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua

Tujuan 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.

Keselarasan SDGs dengan Ilmu kesejahteraan sosial diharapkan mampu memecahkan permasalahan sosial yang ada di dunia khususnya di masyarakat Indonesia. Dengan cara pengembangan keilmuannya melalui penelitian-penelitian yang bermanfaat terutama penelitian yang berfokus pada SDGs.

2.3.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan sosial terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs

2.3.4.1 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah persoalan kemanusiaan. Dari dimensi ini adanya kemiskinan membawa konsekuensi adanya tanggung jawab moral bagi setiap orang untuk memperhatikan kehidupan orang yang hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan adalah juga merupakan pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia. “...*human rights become a constitutive element of development and human rights violations become both a cause and symptom of poverty*” (Tammie O’Nei, 2006,p-7). Hak-hak asasi manusia yang melekat pada diri orang manusia tidak dapat dikurangi, apalagi dicabut. Dari perspektif ini masalah kemiskinan tidak cukup hanya dilihat dari angka-

angka statistik saja. Besar kecilnya masalah kemiskinan tidak dapat hanya dilihat dari persoalan angka statistik. Sekecil apapun angka statistik, di dalamnya terdapat persoalan manusia yang terancam.

Bagi Indonesia sendiri, kemiskinan masih merupakan persoalan yang menjadi beban berat, terutama dikaitkan dengan isui kesenjangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Sebagai bagian dari anggota PBB Indonesia tentunya berkomitmen untuk mengatasi persoalan seiring dengan deklarasi SDGs. Itu artinya Indonesia juga dituntut untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan dalam deklarasi PBB tersebut.

2.3.4.2 Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan Kesejahteraan Sosial

Lanjouw dalam Ginting, et al (2008) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan. Menurut Dunham (Soetarso, 1980), bahwa kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya, Friedlander dalam Suud (2006:8).

2.3.4.3 Tingkat Pendidikan

Memperoleh pendidikan berkualitas adalah fondasi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Kemajuan besar telah dibuat untuk dapat meningkatkan akses pendidikan di semua level pendidikan demi meningkatkan angka partisipan siswa di sekolah. Menurut definisinya kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu (Suud, 2006). Undang-undang (UU) sisdiknas merupakan payung hukum yang mengatur mengenai keseluruhan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Peran pemerintah dalam memenuhi (*fulfill*) hak pendidikan warga negaranya secara jelas dan detil termuat dalam beberapa pasal dalam sisdiknas. Sebagaimana termuat pada Bab IV Pasal 5 Ayat (1) UU sisdiknas, menyebutkan : “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Regulasi lainnya mengenai hak pendidikan juga tercantum pada Pasal 5 Ayat (5), berbunyi : “Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang

hayat". Pada SDGs pendidikan merupakan tujuan ke 4, melalui program SDGs ini diharapkan tingkat pendidikan dapat memenuhi standar yang diharapkan.

2.3.4.4 Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat dipenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan, Midgley (2004). Berdasarkan pengertian tersebut, maka kondisi masyarakat yang sebaliknya dapat dikatakan masyarakat yang tidak mencapai kesejahteraan sosial. Kondisi itu seperti rendahnya harapan hidup, angka melek huruf, partisipasi sekolah, pendapatan rendah, angka harapan hidup yang rendah, terbatasnya aksesibilitas terhadap air bersih dan fasilitas kesehatan serta kekurangan gizi. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut, diperlukan pembangunan kesejahteraan sosial. Menurut Suharto (2005), pembangunan kesejahteraan sosial usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Atau dalam pengertian kemajuan yang dicapai oleh masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

2.3.4.5 Tingkat Kesehatan

Kesejahteraan Sosial adalah sistem yang terorganisir dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga sosial yang ditunjukkan untuk membantu individu atau kelompok dalam mencapai standart hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk

mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. (Walter A.Friedlander, Dalam Whibawa dkk, 2015:29).

Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan:

1. Mencapai kehidupan yang sejahtera dalam artian tercapainya standart kehidupan pokok seperti sandang,perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi–relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuain diri yang baik khususnya dengan masyarkat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.
3. Pembangunan Kesejahteraan Sosial didefinisikan sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan modal ekonomi (*economic capital*), Manusia (*human capital*), Kemasyarakatan (*Society capital*), dan perlindungan (*security capital*) secara terintegrasi dan berkesinambungan. Peningkatan modal ekonomi masyarakat adalah tubuhnya mata pencaharian (*livelihood*) yang memungkinkan mereka memperoleh dan mengelola asset-aset finansial dan material. Dengan demikian, pada gilirannya mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan standar kemanusiaan yang layak dan berkelanjutan (Whibawa dkk, 2015:3)

Bidang usaha kesejahteraan sosial atau pelayanan sosial atau disebut praktik pekerjaan sosial terdiri dari berbagai cakupan yang saling terkait antara satu dengan lainnya:

1. Kesejahteraan anak dan keluarga
2. Kesejahteraan remaja dan generasi remaja
3. Kesejahteraan orang lanjut usia
4. Pelayanan kesejahteraan umum
5. Pelayanan Rekreasional
6. Pelayanan Kesehatan mental
7. Pelayanan Sosial medis
8. Pelayanan Sosial bagi penyandang cacat
9. Pelayanan Sosial bagi wanita
10. Pelayanan Sosial perumahan dan lingkungan

2.3.4.6 Hubungan Tingkat Kesehatan dengan Kesejahteraan Sosial

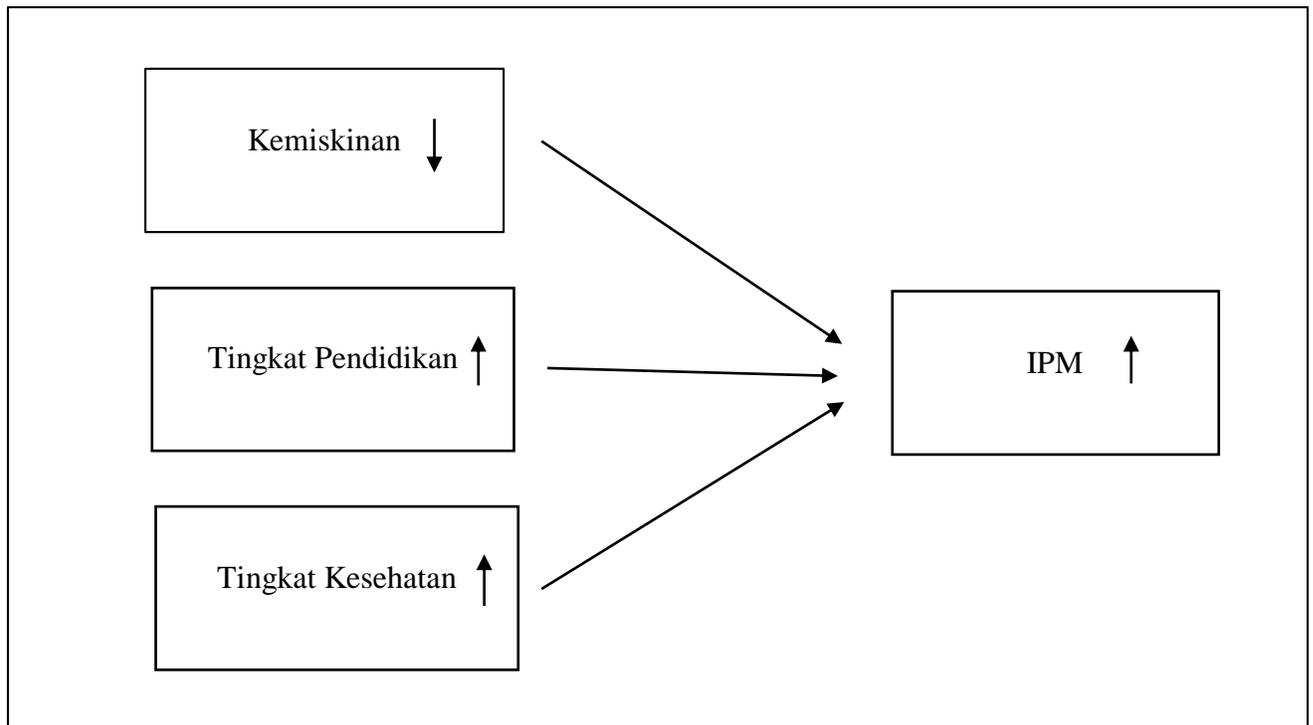
Menurut Suharto (2006:3) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk

memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya, Friedlander dalam Suud (2006:8).

Kemudian Friedlander menggabungkan pelayanan sosial dan lembaga sosial dalam pengertian kesejahteraan sosial, yaitu sistem terorganisasi dari pelayanan dan lembaga sosial yang dimaksudkan untuk membantu perorangan dan kelompok untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan sosial dan pribadi yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan sepenuhnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka serasi dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan sosial juga didefinisikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan (Suharto, 2005).

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah. Dengan mengacuh pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga ada pengaruh antara Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Kesehatan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jombang secara simultan dan parsial.
2. Diduga Tingkat Kemiskinan merupakan yang paling berpengaruh terhadap Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jombang.